

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.16, No.1, Juni 2019

# **DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019**

- Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
- Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019
- Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019
- Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren

## **REVIEW BUKU**

- Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Jurnal Penelitian  
Politik

Vol. 16

No. 1

Hlm. 1-110

Jakarta,  
Juni 2019

ISSN  
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Sutan Sorik, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                                                                                                                       | i       |
| <b>Catatan Redaksi</b>                                                                                                                                                                                  | iii     |
| <b>Artikel</b>                                                                                                                                                                                          |         |
| • <b>Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019</b><br>Efriza                                                                                                                             | 1–15    |
| • <b>Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik<br/>        ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019</b><br>Luky Sandra Amalia                                                               | 17–33   |
| • <b>Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019</b><br>Sarah Nuraini Siregar                                                                                                                       | 35–46   |
| • <b>Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan<br/>        Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi<br/>        Politik Menjelang Pemilu 2019</b><br>Defbry Margiansyah | 47–68   |
| • <b>Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019</b><br>R. Siti Zuhro                                                                                                                                            | 69–81   |
| • <b>Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik<br/>        dalam Sastra Lisan Pesantren</b><br>Dhurorudin Mashad                                                                           | 83–99   |
| <b>Review Buku</b>                                                                                                                                                                                      |         |
| • <b>Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi</b><br>Sutan Sorik                                                                                                                      | 101–107 |
| <b>Tentang Penulis</b>                                                                                                                                                                                  | 109–110 |

## CATATAN REDAKSI

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Artikel berikutnya, “Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019”. Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini membahas upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematian label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah

sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh

Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-

pola kerja populisme dalam proses kontestasi politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasi sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro yang membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Artikel selanjutnya membahas mengenai “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren” ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Tulisan ini membahas mengenai tradisi lisan pesantren salah satunya Shalawat Badar yang ternyata memperlihatkan karakteristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah

ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tentang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. *Review* yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu-isu atau dinamika social politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Selamat membaca.

## **Redaksi**

**POPULISME DI INDONESIA KONTEMPORER:  
TRANSFORMASI PERSAINGAN POPULISME DAN  
KONSEKUENSINYA DALAM DINAMIKA KONTESTASI POLITIK  
MENJELANG PEMILU 2019**

***POPULISM IN CONTEMPORARY INDONESIA:  
TRANSFORMATION OF COMPETING POPULISMS AND ITS  
CONSEQUENCES IN POLITICAL CONTESTATION DYNAMICS  
TOWARD THE 2019 ELECTION***

**Defbry Margiansyah**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: defbry@yahoo.com/defbry.margiansyah@lipi.go.id

Diterima: 15 April 2019; Direvisi: 24 Mei 2019; Disetujui: 25 Juni 2019

***Abstract***

*The rise of populism is a contemporary global phenomenon occurred in many part of the world, including Indonesia. The rising populism in the country has been epitomized by the emergence of two populist candidates, Jokowi and Prabowo, in the 2014 presidential election and recurring in the 2019 simultaneous election, which brings about new complexities in the dynamics of contemporary political contestation. The uniqueness of such competing populist politics is that both exploit the rhetoric of nationalism and social justice combined with the traits of respective candidates, in contrast to the conventional pattern of populists in other nations. This article attempts to analyze the transformation of competing populisms in two different elections and discusses its consequences to electoral politics, including the elaboration on populist's working pattern in contestation processes and factors underlying the return of populism in Indonesia's politics. Employing concept of populism in eclectic way and elite adjustment thesis, this paper demonstrates how populist politics is only instrumented as a vehicle of entrenched elite and oligarchic interests by pragmatically exploiting various aspects ranging from primordial identity, clientelistic relations, achievements and personalities of each candidates, instead of offering greater prospects for substantially political transformation and democratic deepening for the years to come.*

**Keywords:** *Populism, Indonesia's Election, Elite Adjustment, Identity Politics, Oligarchy, Democracy*

**Abstrak**

Kebangkitan populisme merupakan fenomena global era kontemporer yang terjadi diberbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kebangkitan populisme di Indonesia ditandai dengan munculnya dua kandidat populis, Jokowi dan Prabowo, pada pemilu 2014 dan berlangsung kembali di 2019 yang mana menghadirkan kompleksitas baru dalam dinamika kontestasi politik kontemporer. Keunikan dari persaingan politik populis yaitu sama-sama mengeksploitasi retorika nasionalisme dan keadilan sosial dan dipadupadankan dengan persona khas masing-masing kandidat, keadaan ini kontras dengan pola yang ditunjukkan populis dinegara lain secara konvensional. Artikel ini berusaha menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-pola kerja populisme dalam proses kontestasi

politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan *personality* kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

**Kata kunci:** Populisme, Pemilu Indonesia, Penyesuaian Elit, Politik Identitas, Oligarki, Demokrasi

## Pendahuluan

Kebangkitan populisme merupakan fenomena global era kontemporer yang meluas yang kerap diasosiasikan dengan kemenangan Trump dan Brexit.<sup>1</sup> Kecenderungan populisme global ini cenderung menjelma dalam bentuk partai politik (parpol) sayap-kanan radikal yang semakin menonjol karena serangkaian krisis sosial-ekonomi dan politik, terutama dinegara-negara demokrasi yang sudah mapan. Parpol populis kanan ini selalu memunculkan gagasan politik utama politik yang berlandaskan nativisme atau paham yang menekankan perbedaan antara pribumi dan non-pribumi atau pembelahan “us versus them” di masyarakat dengan menegaskan nilai-nilai kebangsaan atau etnisitas setempat. Parpol populis nativistik menjadikan identitas kultural-primordial dan kesamaan persepsi ancaman baik itu realitas sosio-kultural, ekonomi, kedulatan, dan keamanan dengan penduduk natif sebagai basis yang mengafirmasi narasi populisme dalam agenda politiknya seperti penolakan terhadap integrasi regional, arus pengungsi dan migrasi, serta kelompok agama dan etnis minoritas.<sup>2</sup> Hasilnya, gagasan nativisme politik demikian terbukti efektif dalam mempengaruhi dukungan suara pemilih yang sangat besar terhadap kandidat dan parpol populis dalam kontestasi elektoral seperti kebangkitan *Alternative für Deutschland* (AfD) di Jerman, Front National di Prancis, British National Party

(BNP) di Inggris, Bharatiya Janata Party (BJP) di India<sup>3</sup>

Fenomena kebangkitan populisme tersebut tidak terkecuali bagi Indonesia. Populisme di Indonesia kontemporer ditandai dengan munculnya persaingan dua politisi populis sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Pada saat itu, Prabowo menunjukkan gelagat populisme bersifat ultra-nasionalis dan konfrontatif yang ingin mengembalikan Indonesia pada kejayaan masa lalu dalam pandangan negara korporatis, sedangkan Jokowi menampilkan populisme pragmatisme nir-ideologis dan teknokratis dengan tetap merujuk pandangan nasionalisme kerakyatan, dimana politik populis dikombinasikan antara pengalaman teknokrasi dan komunikasi langsung ke akar-rumpun.<sup>4</sup>

Kompetisi antar populisme memang bukan merupakan hal baru dan banyak terjadi di belahan dunia lain dimana populis dari spektrum ideologi yang bersebrangan seperti populis sekuler melawan politik Islam di Timur Tengah, populis kanan ultranasionalis dan kiri sosialis-komunis menentang kemapanan liberal, konservatif, dan sosial demokratis di Eropa.<sup>5</sup> Namun, kasus populisme Indonesia beberapa tahun terakhir

<sup>1</sup> Ronald F. Inglehart and Pippa Norris, “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, July 29, 2016), <https://papers.ssrn.com/abstract=2818659>. SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, July 29, 2016)

<sup>2</sup> Defbry Margiansyah, “Tantangan Masyarakat Islam di Eropa (Analisis Resistensi Kelompok Konservatif Terhadap Islam)” (Universitas Pasundan, 2013).

<sup>3</sup> Delton T Daigle et al., *Populism, Nativism, and Economic Uncertainty: Playing the Blame Game in the 2017 British, French, and German Elections*, 2019; Duncan McDonnell and Luis Cabrera, “The Right-Wing Populism of India’s Bharatiya Janata Party (and Why Comparativists Should Care),” *Democratization* 26, no. 3 (April 3, 2019): 484–501, <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1551885>.

<sup>4</sup> Marcus Mietzner, “Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia” *East-West Center* (2015), JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/resrep06525>.

<sup>5</sup> Vedi R Hadiz and Richard Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia,” *International Political Science Review* 38, no. 4 (September 1, 2017): 488–502, <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>.

menjadi unik karena tren menunjukkan bahwa ideologi nasionalisme dan jejaring politik mapan merupakan basis penopang dari kebangkitan kedua figur populis dalam kontestasi politik nasional terkini. Karakteristik ini sangat berbeda dari populisme yang berkembang secara global dimana antagognisme ideologis sangat jelas terlihat antar aktor populis dan elit politik mapan yang mendominasi institusi formal, serta kebangkitan politik populis cenderung berasal dari pergerakan atau partai politik yang beraliran *anti-establishment*.

Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa populisme memiliki akar sejarah yang kuat dalam politik Indonesia. Dimulai sejak masa awal kemerdekaan dan munculnya populisme nasionalis-kerakyatan dengan pendekatan otoriter dibawah rezim Demokrasi Terpimpin. Berlanjut pada populisme otoritarianisme neoliberal (*post-populism*) yang dibalut dengan teknokratisme masa Orde Baru, sampai pada kembalinya populisme nasionalis-kerakyatan di era Reformasi.<sup>6</sup> Namun, membaca populisme dalam kontestasi politik saat ini tentu akan berbeda dari setiap periode edisi elektoral pasca Reformasi lainnya.

Menurut Joshua Kurlantzick, perkembangan populisme akhir-akhir ini di Indonesia menunjukkan adanya kemunculan *autocrat-leaning populist* atau populis yang cenderung otoriter, dimana ia sangat bergantung pada sosok pemimpin karismatik yang berpengaruh kuat dan otoriter, baik itu dari lingkaran yang sedang berkuasa (petahana) maupun yang berusaha untuk berkuasa (oposisi).<sup>7</sup> Pandangan ini tidak hanya menindikasikan adanya sifat fleksibilitas yang tinggi dari karakteristik kedua politisi populis, tetapi juga perubahan yang mencolok dari strategi politik yang digunakan seperti pada awal kemunculannya di Pilpres 2014. Permasalahan ini akan sangat menarik jika dikaitkan dengan

dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019 yang akan menyajikan "*rematch*" antara kedua politisi populis dengan status petahana dan oposisi yang telah mapan, khususnya dinamika kompetisi antar populisme dan implikasinya bagi konfigurasi politik Indonesia kontemporer.

Dengan berfokus pada periode sebelum Pemilu Serentak (2014-2019), artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana transformasi persaingan antar politik populis dan konsekuensinya bagi politik elektoral Indonesia di pemilu 2019. Untuk dapat memahami permasalahan diatas secara lebih komprehensif, tulisan ini juga akan membahas perdebatan teoritis mengenai populisme dan posisi konseptual penulis. Selanjutnya, pembahasan akan diikuti dengan analisis masalah mengenai kebangkitan populisme terkini dan faktor-faktor yang melatarbelakangi, pola-pola kerja populisme kedua kubu, serta konteks, aktor-aktor, dan maneuver politik antar aliansi kontestan dalam proses kontestasi elektoral. Sehingga, elaborasi rangkaian persoalan diatas dapat membantu memperluas *insight* pembaca dalam memahami dampak populisme bagi demokrasi Indonesia kedepan.

### **Populisme, Penyesuaian Elit, dan Politik Pragmatis**

Pada perdebatan teoritis, populisme dipandang sebagai konsep yang mengalami "*Cinderella Complex*" atau konsep yang ambigu, elusif, dan tumpang tindih. Kompleksitas populisme tersebut disebabkan kurangnya upaya konseptualisasi ide dan cenderung lebih banyak memahami dari lensa komparatif atas kasus-kasus global dari berbagai sudut pandang yang berbeda.<sup>8</sup> Implikasi

<sup>6</sup> Hadiz and Robison, "Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia"; Daniel Ziv, "Populist Perceptions and Perceptions of Populism in Indonesia: The Case of Megawati Soekarnoputri," *South East Asia Research* 9, no. 1 (March 2001): 73–88, <https://doi.org/10.5367/000000001101297324>.

<sup>7</sup> Joshua Kurlantzick, "Southeast Asia's Populism: On the Rise, But Different From Populism in Other Regions," *Council on Foreign Relations* (blog), November 1, 2018, <https://www.cfr.org/blog/southeast-asias-populism-rise-different-populism-other-regions>.

<sup>8</sup> Paul A. Taggart, *Populism* (Open University Press, 2000). the social sciences have given it remarkably little attention. In this lively and engaging book, Paul Taggart surveys the field and concludes that populism has suffered from being considered usually in relation to particular contexts and has therefore become a rather fractured and elusive concept in general terms. To remedy this, the author introduces several themes which illuminate populism across different historical and contemporary cases. He provides a new definition of populism, a survey of other definitions and perspectives, and a guide to populist politics around the world, including the United States, Russia, Latin America, Western Europe and Canada. The second part of the book focuses on the problems of populism and how it relates to democracy, particularly to representative politics. Written in an accessible style, this book is essential reading for

dari keberagaman ini memunculkan beberapa kategori pendekatan yang digunakan dalam studi populisme yaitu *diskursif*, *ideasional*, *organisasional* atau *multikelas*.<sup>9</sup>

Pendekatan *diskursif* Ernesto Laclau menekankan pada konstruksi politik akan penyatuan “tuntutan/aspirasi” yang homogen dari masyarakat yang heterogen dalam dikotomi antara tuntutan “rakyat” yang tidak terpenuhi dan kekuasaan yang tidak responsif. Tuntutan ini direkatkan dengan kesaamaan simbolik antar rakyat melalui proses diskursif dalam bentuk agenda politik bersama.<sup>10</sup> Adapun pendekatan *ideasional* Cas Mudde lebih memfokuskan perhatiannya pada ide, retorika, dan manuver politik populis dengan tiga elemen dasarnya yaitu: “rakyat” (*the people*), “elit” (*the elite*), “kehendak rakyat umum” (*the general will of people*).<sup>11</sup> Baginya populisme merupakan sebuah

---

those with an interest in politics and sociology who are studying political ideas, ideologies and social movements.”,”ISBN”:"9780335200467",”note”:"Google-Books-ID: su1UAQAIAAJ",”language”:"en",”author”:[{"family”:"Taggart",”given”:"Paul A."}],”issued”:{“date-parts”:[["2000"]]}},”schema”:"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

<sup>9</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia...,”

<sup>10</sup> Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London; New York: Verso, 2005).

<sup>11</sup> Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, 2nd ed. edition (New York, NY: Oxford University Press, 2017).NY”,”number-of-pages”:"136",”edition”:"2nd ed. edition",”source”:"Amazon",”event-place”:"New York, NY",”abstract”:"Populism is a central concept in the current media debates about politics and elections. However, like most political buzzwords, the term often floats from one meaning to another, and both social scientists and journalists use it to denote diverse phenomena. What is populism really? Who are the populist leaders? And what is the relationship between populism and democracy? This book answers these questions in a simple and persuasive way, offering a swift guide to populism in theory and practice.Cas Mudde and Cristóbal Rovira Kaltwasser present populism as an ideology that divides society into two antagonistic camps, the “pure people” versus the “corrupt elite,” and that privileges the general will of the people above all else. They illustrate the practical power of this ideology through a survey of representative populist movements of the modern era: European right-wing parties, left-wing presidents in Latin America, and the Tea Party movement in the United States. The authors delve into the ambivalent personalities of charismatic populist leaders such as Juan Domingo Perón, H. Ross Perot, Jean-Marie Le Pen, Silvio Berlusconi, and Hugo Chávez. If the strong male leader embodies the mainstream form of populism, many resolute women, such as Eva Perón, Pauline Hanson, and Sarah Palin, have also succeeded in building a populist status, often by

ideologi prosedural nan lentur (*a thin-centered ideology*) yang menegaskan pembelahan tajam antara “rakyat yang murni” berbudi luhung dan “elit korup” yang diasosiasikan sebagai kelompok penindas dan tamak yang selalu mengabaikan kehendak umum.<sup>12</sup> Pendekatan *multikelas* atau *organisasional* berbasiskan perspektif ekonomi politik struktural, menurut Vedi Hadiz dan Richard Robinson pendekatan ini tidak hanya memiliki fokus pada moda organisasi dan strategi gerakan politik populis, termasuk kemapanan institusi perwakilan yang dihadapinya, tetapi juga aksentuasi pada basis sosial dan material dari populisme terkait konflik atas kekuasaan dan sumber daya pada konteks historis tertentu.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, kerangka strukturalis ini mengartikan populisme sebagai ekspresi politik yang merepresentasikan koalisi antar-kelas asimetris yang berisi *like-minded people* dengan artikulasi kepentingan kolektif. Dalam artian, populisme juga meliputi “penanggulangan perbedaan/*suspension of difference*,” sebuah situasi yang merujuk pada proses homogenisasi “rakyat” dengan latarbelakang identitas masyarakat yang majemuk dan dikonfrontirkan musuh politik bersama yaitu elit-elit atau entitas asing lewat jalur konstruksi diskursus atau kontestasi kekuasaan. Pembagian siapa yang layak diartikan sebagai bagian dari definisi “rakyat” atau bukan ditentukan berdasarkan materialitas identitas politiknya.<sup>14</sup>

---

exploiting gendered notions of society.Although populism is ultimately part of democracy, populist movements constitute an increasing challenge to democratic politics. Comparing political trends across different countries, this compelling book debates what the long-term consequences of this challenge could be, as it turns the spotlight on the bewildering effect of populism on today’s political and social life.”,”ISBN”:"9780190234874",”shortTitle”:"Populism",”language”:"English",”author”:[{"family”:"Mudde",”given”:"Cas"}, {"family”:"Kaltwasser",”given”:"Cristobal Rovira"}],”issued”:{“date-parts”:[["2017"],2,1]}},”schema”:"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

<sup>12</sup> Cas Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, 1<sup>st</sup> Edition (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007).

<sup>13</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia”

<sup>14</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia”

Dari uraian diatas, dapat dikatakan masing-masing pendekatan memiliki penekanan yang penting dan saling memperkuat konseptualisasi populisme secara umum. Pendekatan diatas sangat membantu untuk membangun suatu perspektif yang holistik dan komprehensif dalam menjelaskan masalah yang difokuskan melalui kombinasi antar elemen-elemen yang beragam dari pendekatan diatas. Untuk memungkinkan penggabungan pendekatan yang beragam itu, studi ini akan mengikuti prosedur analisis eklektisisme atau *analytic eclecticism* untuk mengkonstruksikan gagasan substantif dengan menangkap berbagai proposisi penting dari pendekatan-pendekatan yang bersinggungan satu sama lain dan memiliki signifikansi dalam memperkuat koherensi argumen yang akan dibangun.<sup>15</sup>

Sebagai upaya untuk membangun basis konseptual, artikel ini mengartikan populisme bukan sekedar pandangan dunia bersifat lentur yang mengutamakan perjuangan kehendak “rakyat umum,” tetapi juga gaya politik yang menenankan pada perlawanan terhadap dominasi elit yang selama ini menguasai tatanan politik dan sosial arus utama secara eksklusif, timpang, dan imoral. Upaya perlawanan tersebut menggunakan strategi mobilisasi rakyat dalam berbagai proses dan instrumen demokratis dan konstitusional dengan bergantung pada pengeksploitasian narasi dan retorika yang mengklaim keberpihakan pada “*vox populi*” atau kepentingan umum yang berpusat pada kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi politik.<sup>16</sup> Selain dipandang tepat untuk memperlemah *status-quo* jejaring politik bisnis elit predatori, strategi mobilisasi ini memiliki daya tarik bagi masyarakat umum yang kecewa pada kinerja elit pemerintahan berkuasa dan yang tersandera oleh politik representasi karena kehadiran kubu populis terkesan sebagai katalisator demokratis yang datang untuk mengakomodir tuntutan rakyat

yang selama ini termarginalkan dari politik arus utama.<sup>17</sup> Dengan begitu, penting untuk melihat tiga komponen utama yang menentukan kesuksesan operasionalisasi politik populis diatas yaitu figur pemimpin karismatik, partai politik, dan pergerakan.<sup>18</sup>

Namun, penggunaan kata “rakyat” dalam retorika populis cenderung ambigu karena diinterpretasikan oleh imajinasi kubu populis sebagai kesatuan masyarakat yang bermoral yang

<sup>17</sup> Taggart, *Populism*. the social sciences have given it remarkably little attention. In this lively and engaging book, Paul Taggart surveys the field and concludes that populism has suffered from being considered usually in relation to particular contexts and has therefore become a rather fractured and elusive concept in general terms. To remedy this, the author introduces several themes which illuminate populism across different historical and contemporary cases. He provides a new definition of populism, a survey of other definitions and perspectives, and a guide to populist politics around the world, including the United States, Russia, Latin America, Western Europe and Canada. The second part of the book focuses on the problems of populism and how it relates to democracy, particularly to representative politics. Written in an accessible style, this book is essential reading for those with an interest in politics and sociology who are studying political ideas, ideologies and social movements.”, “ISBN”: “9780335200467”, “note”: “Google-Books-ID: suUA QAAIAAJ”, “language”: “en”, “author”: [“family”: “Taggart”, “given”: “Paul A.”], “issued”: [“date-parts”: [“2000”]]], “schema”: “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} .,

<sup>18</sup> Sergiu Gherghina, Sergiu Mişcoiu, and Sorina Soare, *Contemporary Populism: A Controversial Concept and Its Diverse Forms* (Cambridge Scholars Publishing, 2013). as a large amount of literature has focused on this topic for more than half a century. As little conceptual consensus has been reached so far, this book aims to reduce the level of abstraction. To this end, it approaches the populist phenomenon from a broader theoretical and empirical perspective, making reference to its developments on several continents. The book is divided into two parts: the first is theoretical and discusses various perspectives on populism, while the second is empirical and emphasises the diversity of the forms populism has embraced throughout the world. Without aiming to solve old dilemmas, to cover all the existing forms of populism, or to outline unequivocal conclusions, the contributions to this book fulfil a twofold task. On the one hand, they help to clarify theoretically a concept that is difficult to grasp and use. On the other hand, by way of reflecting these difficulties, they present several forms of populism worldwide. Their main purpose is to highlight the differences between the continents. Each of the chapters in the second section successfully accomplishes this, providing an overview that is useful both in analysing populism and in identifying the populist elements in national and international political actions or discourses.”, “ISBN”: “9781443849975”, “note”: “Google-Books-ID: sMkwBwAAQBAJ”, “shortTitle”: “Contemporary Populism”, “language”: “en”, “author”: [“family”: “Gherghina”, “given”: “Sergiu”], “family”: “Mişcoiu”, “given”: “Sergiu”], “family”: “Soare”, “given”: “Sorina”], “issued”: [“date-parts”: [“2013”, “7”, “16”]]], “schema”: “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}

<sup>15</sup> Rudra Sil and Peter J. Katzenstein, “Analytic Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research Traditions,” *Perspectives on Politics* 8, no. 2 (2010): 411–31, <https://www.jstor.org/stable/25698610>.

<sup>16</sup> Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy,” *Political Studies* 47, no. 1 (March 1999): 2–16, <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00184>.

berada pada lokasi tertentu atau *heartland*.<sup>19</sup> Makna rakyat yang dimaksud populis dapat kita artikan sebagai pemilih mayoritas, khususnya “*silent majority*” yang kecewa dan jenuh akan kondisi kehidupan yang dipersepsikan semakin susah akibat terselewangnya aspirasi mereka dalam kebijakan krusial oleh politisi dominan. Akan tetapi, pemilih mayoritas ini agak kurang melibatkan diri dalam proses politik tetapi fokus pada *output* demokrasi yang sesuai dengan ekspektasinya yang besar. Pada tahap ini, kekecewaan pemilih terhadap elit politik ini selanjutnya menjadi prakondisi bagi optimalisasi strategi populis dalam membangun relasi simbolik dan basis sosial pada konstituen potensial melalui penyamaan visi politik, identitas, persepsi ancaman, dan penanggungan perbedaan. Dengan cara tersebut, aktor populis mengkonstruksikan diri sebagai harapan baru yang aspiratif tanpa harus merepotkan mereka dalam mekanisme demokrasi dan partisipasi politik yang rumit.<sup>20</sup> Untuk itu, *heartland* menjadi penting dalam menganalisis populisme karena membantu untuk mengidentifikasi kantong-kantong dukungan suara populis potensial baik itu atas dasar identitas primordial, karakteristik demografi, kultur politik, dan kondisi sosio-ekonomi.

<sup>19</sup> Taggart, *Populism*. the social sciences have given it remarkably little attention. In this lively and engaging book, Paul Taggart surveys the field and concludes that populism has suffered from being considered usually in relation to particular contexts and has therefore become a rather fractured and elusive concept in general terms. To remedy this, the author introduces several themes which illuminate populism across different historical and contemporary cases. He provides a new definition of populism, a survey of other definitions and perspectives, and a guide to populist politics around the world, including the United States, Russia, Latin America, Western Europe and Canada. The second part of the book focuses on the problems of populism and how it relates to democracy, particularly to representative politics. Written in an accessible style, this book is essential reading for those with an interest in politics and sociology who are studying political ideas, ideologies and social movements.”, “ISBN”: “9780335200467”, “note”: “Google-Books-ID: suUA QAAIAAJ”, “language”: “en”, “author”: [“family”: “Taggart”, “given”: “Paul A.”], “issued”: {“date-parts”: [“2000”]}}, “schema”: “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” .,

<sup>20</sup> Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,” *Government and Opposition* 39, no. 4 (September 2004): 542–63, <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>; Mudde and Kaltwasser, *Populism*; Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.””plainCitation”: “Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist,” *Government and Opposition* 39, no. 4 (September 2004

Menurut Cas Mudde, pola strategi politik populisme kontemporer menggunakan “logika media (*media logics*)” yang menegaskan aspek *personalisasi*, *emosionalisasi* dan sifat *anti-kemapanan* dalam memenangkan dukungan konstituen.<sup>21</sup> Untuk memahami pola tersebut penting untuk mengetahui moda interaksi (*mode of interaction*) populis dalam mengkonstruksikan kesamaan kepentingan dengan konstituen yang majemuk. Moda interaksi tersebut dioperasionalisasikan melalui tiga jalur yaitu *diskursif*, *ideasional*, ataupun *material*. Jalur *diskursif* lebih banyak mengedepankan narasi dan retorika yang menggugah emosional dan berkelindan dengan kekuatan rasional dan aksi komunikatif. Jalur *ideasional* merujuk pada penyerapan dukungan yang mengandalkan faktor kognitif dan emosional seperti keterkaitan emosional, afeksi personal, simpati, norma subjektif, dan keyakinan. Sedangkan, jalur *material* cenderung untuk mengeksploitasi soliditas jaringan/*network* sosio-ekonomi, kapasitas distribusi pengaruh, penyediaan bantuan finansial dan sumber daya lain. Yang paling penting untuk dicatat moda artikulasi ini juga bergantung kepada impresi dan signifikansi yang dimaknai audien. Pemahaman tersebut dapat muncul tidak hanya dari konsumsi narasi dan retorika lewat pidato dan pemikiran, tetapi juga perilaku atau tindakan termanifestasikan dalam aktivitas sehari-hari aktor populis tersebut.

Selain elaborasi populisme diatas, artikel ini juga memanfaatkan konsep penyesuaian elit/*elite adjusment* dan pragmatisme politik dalam memperkuat kerangka pemikiran. Tesis penyesuaian elit sangat penting untuk memahami dinamika populisme dalam politik Indonesia, dimana peran elit masih sangat dominan dalam menentukan konfigurasi politik elektoral di Indonesia sesuai dengan kepentingan jaringan oligarki melalui pola strategi yang adaptatif dan responsif, termasuk taktik *ala* populisme. Hal ini sejalan dengan konseptualisasi Panji A. Permana tentang *elite adjustment*<sup>22</sup> yang menekankan

<sup>21v</sup> Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*; Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.”

<sup>22</sup> Panji Anugrah Permana, “Local Elite Adjustment in Indonesia’s Democratization: Case Studies of North Sumatra and East Java, 1998-2013” (Doctoral Dissertation, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 2017).

pada proses penyesuaian elit rezim “lama” yang bertahan dari gelombang arus demokratisasi dan tetap menjadi bagian lingkaran kekuasaan rezim “baru” di alam demokrasi. Kondisi demikian tercipta dari interaksi dinamis antara perubahan struktur institusional, tindakan strategis aktor, dan kontestasi ide dalam proses demokratisasi.

Manifestasi dari “penyesuaian elit” ini dapat berupa pengadopsian strategi “konformitas pasif,” “penerimaan simbolis,” dan “pemimikan isomorfis/*ishomorphic mimicry*” atas basis normatif/norma baru yang berlaku, tergantung pada konteks institusi, fase demokratisasi, dan ekspektasi publik. Tingkatan efek dari “penyesuaian elit” akan semakin kuat apabila strategi yang dipilih didukung dengan kombinasi antara kecakapan politis dan kapabilitas birokratik dalam arena politik yang demokratis. Operasionalisasi konsep ini dalam konteks Indonesia yang kental akan politik klientelisme dan dominasi oligarki akan memberikan sudut pandang yang lain dalam menginterpretasikan dinamika politik populis di level nasional, dimana proposisi populisme arus-utama selalu mengartikan “elit-elit” dan seperangkat manifestasi politiknya sebagai anti-tesis dari “kepentingan rakyat umum.”<sup>23</sup>

Eksplanasi konsep-konsep diatas tampaknya memiliki kesesuaian apabila populisme dan dominasi elit dikaitkan dengan gagasan pragmatisme politik. Menurut Firman Noor, sikap politik nir-ideologis yang mengedepankan kepentingan sesaat ini telah dipertontonkan oleh aktor-aktor politik dari berbagai latarbelakang dalam konstelasi politik praktis, baik di tingkat akar rumput maupun elit partai politik. Kemunculan pragmatisme politik di level rakyat biasa tidak lepas dari tumbuhnya skeptisisme terhadap kondisi perpolitikan, ketimpangan kesejahteraan ekonomi, dan preferensi kebijakan atau keputusan politik yang berorientasi manfaat material sesaat. Sedangkan, perilaku pragmatis yang marak berkembang di tubuh partai politik (parpol) dan elitnya lebih cenderung pada keinginan untuk mempertahankan atau merebut *status-quo* yang terleka dilingkaran kekuasaan seperti dukungan tokoh non-partai populer,

jaringan non-kader, koalisi nir-ideologis, dan kandidat elitis dalam kontestasi politik elektoral.<sup>24</sup>

Kebangkitan pragmatisme politik ini mulai mendominasi dan menggerogoti perilaku aktor dan lembaga politik di Indonesia, terumana di era yang ditafsirkan sedang menuju *post-democracy*. Kondisi tersebut digambarkan bagaimana eksistensi institusi dan proses demokrasi yang seharusnya inklusif dan partisipatif malah terkooptasi oleh eksklusivitas elit-elit dan korporasi dalam kebijakan publik. Kepentingan parsial ini dikonstruksikan melalui pendekatan populisme berbingkai “kepentingan umum” dengan tujuan yaitu mengamankan hegemoni elit-elit dan oligarki. Tren ini jelas tergambarkan dari karakteristik beberapa partai politik di Indonesia dengan bentuk *formal shell* (pembentukan struktur kepartaian yang eksklusif dan berjarak terhadap massa), dioperasikan oleh gaya “firma politik,” independensi finansial disokong kekuatan korporat, mengutamakan personifikasi secara pragmatis, pendekatan *top-down* dalam agenda partai, dan loyalitas berorientasi pragmatisme.<sup>25</sup> Keterkaitan antara konsep populisme, “penyesuaian elit,” dan pragmatisme politik akan menjadi landasan konseptual utama dalam proses analisis terhadap pengaruh kebangkitan populisme terhadap dinamika politik elektoral dan tindakan aktor politik menjelang pemilu serentak dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas demokrasi.

### **Kebangkitan Populisme di Indonesia Kontemporer**

Berakhirnya kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan momentum sirkulasi elit yang memunculkan harapan baru terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Harapan baru tersebut adalah munculnya sosok reformis yang cakap dalam melanjutkan reformasi

<sup>23</sup> Panji Anugrah Permana, “Local Elite Adjustment in Indonesia’s Democratization...,”

<sup>24</sup> Firman Noor, “Pilkada, Peran Partai Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim Tahun 2017-2018,” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (December 31, 2018): 179–96, <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>.

<sup>25</sup> Firman Noor, “Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya,” *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (December 29, 2017): 109–26, <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.724>.

demokrasi, merealisasikan pemerintahan bebas korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan yang lebih luas, kebijakan steril dari kepentingan segelintir kelompok dan memprioritaskan kemakmuran rakyat yang lebih besar. Hal tersebut merupakan suatu kondisi realistik yang dianggap gagal dituntas oleh pemerintah. Tentunya, kombinasi permasalahan diatas menjadi basis referensi dari visi dan sikap politik kandidat populis dalam menebarkan harapan-harapan baru pada konsetasi periode ini.

Pilpres 2014 menjadi titik balik menguatnya pengaruh populisme dalam politik Indonesia seiring dengan munculnya dua figur populis Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai kontestan utama. Pada masa ini, populisme menjadi kosa kata baru yang banyak diperbincangkan publik dalam diskursus politik. Menariknya, kontestasi ini dipenuhi dengan penggunaan politik populis yang sama-sama menggelorakan retorika nasionalisme, sentimen anti-asing, dan klaim anti-kemapanan. Kendati demikian, ada perbedaan signifikan dalam konfigurasi dan pendekatan populisme karena ditampilkan dengan ciri khas masing-masing.

Kembali majunya Prabowo 2014, setelah mengalami kekalahan bersama dengan Megawati (Mega-Pro) di Pilpres 2009, menandakan keberlanjutan populisme nasionalis klasik di Indonesia. Prabowo menitikberatkan wacana politik pada isu pembangunan yang berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat dengan menonjolkan retorika yang menentang keras musuh bersama rakyat Indonesia yaitu aktor/korporasi asing beserta komprador lokalnya, baik itu pejabat publik dan elit-elit politik korup yang mementingkan kepentingan pribadi. Narasi ini muncul atas dasar kondisi ketidakadilan dan kesulitan yang dirasakan rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan karena kegagalan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara yang “bocor” ke luar negeri dan terlalu bergantung pada dominasi ekonomi asing, situasi yang menyimpang dari amanat konstitusi 1945. Kondisi ini hanya dapat dirubah oleh pemimpin yang berani menutup kebocoran dan kuat terhadap intervensi politik dari berbagai arah. Narasi politik populis Prabowo diatas tampak berupaya membangun

relasi mutualisme dengan konstituen secara *diskursif* dengan menempatkan dirinya sebagai bagian dari *common people* melalui konstruksi citranya sebagai figur pemimpin kuat yang cocok dalam menyelesaikan persoalan kritis bangsa.

Dalam dinamika kampanyenya, populisme Prabowo dibangun dengan menggunakan moda interaksi lewat jalur *diskursif*. Hal ini terlihat adanya kombinasi antara dua gagasan pemimpin terdahulu yaitu nasionalisme konfrontatif dan anti-neokolonialisme Barat ala *Sukarno* dan konsepsi pembangunan integral ala *Suharto* dalam narasi populis. Dua gagasan besar ini menginspirasi visi politik Prabowo yang berorientasi pembangunan yang adil dan makmur bagi rakyat kecil dengan dorongan sentimen anti-asing. Penggunaan narasi historis yang mengandung memori kolektif dalam moda interaksi diskursif Prabowo ditujukan untuk membangun kesamaan persepsi akan krisis kepemimpinan dan disfungsi institusi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi politik dari intervensi asing yang kian merajalela, khususnya pada konstituen yang masih memiliki ikatan emosional dan ideologis dengan kedua pemimpin nasional Indonesia tersebut.

Namun, retorika Prabowo yang menegaskan konfrontasi terhadap berbagai pihak dan imajinasi yang ingin mengembalikan kejayaan seperti masa rezim otoriter mengindikasikan dirinya sebagai populis otokratis anti-demokrasi.<sup>26</sup> Asumsi sikap Prabowo tersebut diperjelas oleh jejak historis sebagai bagian dari rezim Suharto, dugaan keterlibatan atas kasus pelanggaran hak asasi berat 1998 dan karakternya yang temperamental memberikan kesan akan adanya kerentanan emosi yang dialaminya untuk mengelola pemerintahan negara nantinya. Ditambah lagi, eksistensi oligarki sebagai penyokong utama parpol pimpinan Prabowo, Gerindra,<sup>27</sup> semakin meyakinkan kecurigaan akan gelagatnya untuk melindungi kepentingan terselubung jejaring elit politik bisnis dengan bungkus populisme nasionalis yang patriotik.

<sup>26</sup> Edward Aspinall, “Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy,” *Indonesia* 99, no. 1 (May 29, 2015): 1–28, <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002>.

<sup>27</sup> Noor, “Pilkada, Peran Partai Dan Konstelasi Pragmatis..”

Sehingga, nominasi Prabowo dipandang sebagai ancaman bagi konsolidasi demokrasi dan potensi akan kembalinya Indonesia pada rezim otoritarianisme.<sup>28</sup>

Sementara itu, populisme Jokowi cenderung memperlihatkan karakteristik yang berbeda dari populis di dunia pada umumnya. Visi politiknya tidak menawarkan transformasi sistem politik dan *status-quo* secara radikal dengan menyerang eksistensi elit-elit politik yang berkuasa. Retorika anti-asing dan anti-elit cenderung diartikulasikan secara lunak dan implisit oleh Jokowi. Misalnya, ia menyoroti kedaulatan negara yang terancam oleh kesepakatan internasional, tidak maksimalnya penggunaan sumber daya alam bagi keadilan sosial dan kebaikan rakyat, serta kebergantungan besar pada hutang luar negeri oleh elit berkuasa sebelumnya.<sup>29</sup> Walaupun populisme Jokowi tidak menjadikan sentimen ini sebagai basis mobilisasi dukungannya, persoalan perbaikan layanan publik, penyerhanaan birokrasi, dan reformasi sektor kesehatan dan pendidikan merupakan fokus utama yang ditawarkan pada konstituennya. Kondisi ini mencerminkan pandangan politik Jokowi yang pragmatis dan berorientasi pada perubahan konkrit daripada perwujudan visi politik yang lebih besar.<sup>30</sup>

Karakteristik diatas terbentuk dari pengalaman teknisnya di birokrasi dan dunia usaha yang banyak berurusan dengan permasalahan yang dirasakan oleh berbagai *stakeholders* dan akar rumput. Pengalaman dan kompetensi ini merupakan modal dasar populisme teknokratis Jokowi dalam membangun hubungan relasi mutualismenya dengan konstituen dari berbagai kalangan dan kelas. Deskripsi diatas menunjukkan bahwa populisme Jokowi menggunakan moda interaksi *ideasional* inter-sistemik sebagai instrumen utama dalam membangun ikatan reprotisitas yang termanifestasikan lewat gaya komunikasi inklusifnya yang fenomenal atau dikenal dengan *Blusukan*. Pola komunikasi informal ini ditujukan untuk mengawasi kinerja birokrat-birakrot dilapangan dan menyerap

keluhan dan aspirasi masyarakat langsung diruang publik seperti pasar dan transportasi umum lewat dialog. Upaya ini dilakukan demi melihat fakta riil akan kondisi sosio-kultural masyarakat dengan arah kebijakan teknokratis yang akan dirumuskan. Selain mempekokoh kapasitas *leadership* dan persona uniknya, kombinasi ini lah yang menjadi bentuk baru pola pengkonstruksian persepsi “*common people*” dari populisme ala Jokowi, yaitu tindakan populis yang mengganti retorika populis dalam memobilisasi suara *median voters* dalam memenangkan kontestasi presiden.

Penguatan citra populis dalam persaingan populisme ini ternyata juga diikuti oleh upaya saling melemahkan kekuatan rival melalui “kampanye negatif” dan “kampanye gelap.” Upaya ini dapat dipahami sebagai instrumen komplementer bagi narasi populisme dalam menggoyahkan preferensi pemilih dengan menyasar ikatan emosional dan sentimen personal massa tertentu. Seperti, merebaknya isu tentang kebangkitan PKI lewat majalah “Obor Rakyat” untuk memobilisir kemarahan kelompok Islam dan ultranasionalis, atau isu tentang majunya pelanggar HAM dan kroni rezim otoriter Orde Baru yang ingin melemahkan demokrasi untuk memobilisir kekhawatiran kelompok liberal pluralis. Namun, menariknya serangan politik ini diartikulasikan terpisah dari sentuhan kandidat utama dan cenderung dieksekusi oleh simpatisan arus-bawah secara sah atau ilegal agar dapat menjaga integritas pasangan calon (paslon) dari kesan yang bertentangan dengan etika dan fatsun politik yang berlaku serta mengamankan basis pemilih mayoritasnya.

Selanjutnya, melihat hasil Pilpres 2014 yang memenangkan Jokowi sebagai presiden terpilih menunjukkan bahwa populisme teknokratis-inklusif lebih berfungsi baik dalam menggalang dukungan konstituten yang majemuk dibandingkan populisme ultranasionalis-konfrontatif. Kontras dengan tren global dimana pengeksploitasian instabilitas dan krisis menjadi katalis kemenangan politik populis,<sup>31</sup> kasus pemilu presiden Indonesia 2014 ini justru

<sup>28</sup> Aspinall, “Oligarchic Populism”; Mietzner, “Reinventing Asian Populism...,”

<sup>29</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia...,”

<sup>30</sup> Mietzner, “Reinventing Asian Populism...,”

<sup>31</sup> Jean-Paul Gagnon et al., “What Is Populism? Who Is the Populist?: A State of the Field Review (2008-2018),” *Democratic Theory* 5, no. 2 (December 1, 2018): vi – xxvi, <https://doi.org/10.3167/dt.2018.050201>.

mendemonstrasikan bagaimana narasi populis ultranasionalis tidak bekerja baik dalam suksesi kemenangan Prabowo. Hal tersebut terhambat oleh moderatnya persepsi publik terhadap krisis politik di Indonesia, disamping tidak maksimalnya mobilisasi suara basis pendukung di daerah Islam konservatif, rendahnya dukungan di daerah miskin pinggiran (*rural poor*), yang merupakan basis suara Jokowi.<sup>32</sup> Kondisi ini tidak membangun keterdesakan akan kehadiran pemimpin kuat untuk menyelamatkan negara dari kehancuran dan turbulensi global. Sebaliknya, tren ini cenderung membentuk preferensi politik masyarakat kepada calon pemimpin yang lebih mengedepankan tawaran rasional, teknis, dan terukur dalam menciptakan perubahan konkrit dan reformasi pemerintahan tanpa banyak menghadirkan penentangan dan agitasi terhadap kelompok tertentu.

### ***Faktor-faktor Pendorong Kebangkitan Populisme***

Lebih dari itu, kemenangan populisme teknokratis juga menandai titik balik kebangkitan politik populis di Indonesia yang didasari oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, adanya kebaruan gaya politik yang ditampilkan kandidat *anti-established*. Kepopuleran sosok Jokowi dengan *blusukan*, citra anti-korupsi, dan merakyat seolah-olah menjadi “disrupsi” bagi kemapanan gaya politisi arus utama di Indonesia, identik dengan karakter yang hirarkis, elitis, dan berjarak kepada rakyat; gaya politik yang kerap diasosiasikan sebagai warisan rezim klientalistik dan otoriter Orde-Baru. Jauh sebelum Pilpres digaungkan, komunikasi inklusif dan fleksibel pada rakyat, sikap santun, dan kinerja Jokowi ini turut disempurnakan dengan intensitas sorotan media dan perbincangan daring/*online* di media sosial, menjadikannya bukan sekedar tokoh politik, tapi sebagai sosok *media darling* yang mengedepankan personanya dengan *framing* berdasarkan *media logics*. *Branding* politik Jokowi tersebut menjadi motor penggerak dalam berbagai kampanye politik dengan menonjolkan

persona individunya sebagai sosok reformis, identik dengan representasi *people power* yang muncul dari luar kemapanan politik elitis dan klientalistik.

Populisme teknokratis-inklusif Jokowi dipandang sebagai *trendsetter* yang berhasil menggeser gaya politik eksklusif yang kaku dan formal, ke arah politik yang inklusif, informal dan pro-rakyat. Gaya politik *blusukan* Jokowi tersebut tidak hanya mampu menarik dukungan relawan-relawan di akar rumput baik lewat platform luring dan daring, tetapi juga berhasil mempengaruhi lahirnya politisi populis teknokratis lainnya di tingkat daerah. Pemimpin populis lokal tersebut memiliki orientasi pada perubahan tata kelola pemerintahan lokal dan *public service delivery* dengan pendekatan kreatif dan kekinian seperti penggalakan inovasi teknologi dalam birokrasi dan mendorong partisipasi komunitas secara terbuka dan lebih luas. Politisi populis daerah tersebut antara lain Ridwan Kamil di Bandung, Tri Rismarismahari di Surabaya, dan Ahok di DKI Jakarta.<sup>33</sup>

*Kedua*, ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan pendahulu dalam mengatasi masalah yang mendesak tanpa gebrakan. Hal tersebut muncul dari bertahannya kompleksitas birokrasi dalam pelayanan publik, masih ditemukannya konflik horizontal di akar rumput, dan meningkatnya ketimpangan pembangunan di daerah-daerah yang terlihat dari Rasio Gini Coefficient Indonesia yang terus melonjak dari 34 di tahun 2004 ke 41 di tahun 2014.<sup>34</sup> Lebih

<sup>33</sup> Abdul Hamid, “Observation of Democratic Decentralization in Indonesia during 2009-2014 : Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province” (PhD Thesis, Doshisha University, 2015), <https://ci.nii.ac.jp/naid/500000978660>.

<sup>34</sup> World Bank, “Indonesia’s Rising Divide” (The World Bank, March 1, 2016), <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>. Indonesia stands as an increasingly divided country, unequal in many ways. There is a growing income divide between the richest 10 percent and the rest of the population, and this gap is driven by many other types of inequality in Indonesia. People are divided into haves and have-nots from before birth. Some children are born healthy and grow up well in their early years; many do not. Some children go to school and receive a quality education; many do not. In today’s modern and dynamic economy; most do not and are trapped in low-productivity and low-wage jobs. Some families have access to formal safety nets that can protect them from the many shocks that occur in life; many do not. And a fortunate few Indone-

<sup>32</sup> Dimitar Gueorguiev, Kai Ostwald, and Paul Schuler, “Re-match: Islamic Politics, Mobilisation, and the Indonesian Presidential Election,” *Political Science* (March 22, 2019): 1–13, <https://doi.org/10.1080/00323187.2019.1584733>; Mietzner, “Reinventing Asian Populism.”

khusus, bagaimana kondisi kekecewaan publik tergambarkan dari diskursus yang beredar di ruang publik akan kegagalan SBY dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan elit-elit utama dalam pemerintahan dan anggota keluarganya, termasuk kemandegan penyelesaian kasus Bank Century dan drama KPK.<sup>35</sup> Serangkaian problem yang belum sepenuhnya tuntas ini menjadi bentuk umum dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah direzim sebelumnya. Kekecewaan publik ini selanjutnya terkonversi menjadi perasaan *insecure* dan skeptis pemilih terhadap kandidat dari jaringan elit politik dan oligarki.

*Ketiga*, keraguan pemilih terhadap pemilu sebagai ajang untuk menjaring pemimpin dan wakil rakyat yang berdampak besar pembangunan dan reformasi sistemik. Keraguan tersebut muncul dari maraknya politik klientalisme yang semakin merajalela pada setiap kontestasi politik. Klientelisme dilihat sebagai penyebab dasar dari disfungsi institusi negara dan kemandulan kebijakan, khususnya yang berorientasi pembangunan dan kesejahteraan sosial. Sudah menjadi rahasia umum di akar rumput bahwa politisi tidak datang dengan politik programatik yang mengedepankan gagasan solutif, melainkan dengan penawaran pada politik transaksional pragmatis dengan konstituen dengan wujud politik uang, praktik jual-beli suara, dan aktivitas pertukaran keuntungan lainnya. Ditambah dengan efek yang dimunculkan arus demokratisasi yang menyebabkan posisi tawar para calo atau *broker* politik dan pemilih terhadap kandidat cenderung lebih tinggi dalam penggalangan suara. Kondisi tersebut membuat relasi informal patron-klien di akar rumput semakin *pervasive*, intensif, dan saling bergantung. Sehingga, praktik politik klientelistik ini telah mengurat akar dalam dinamika sosio-kultural masyarakat Indonesia di setiap tingkatan pelaksanaan demokrasi. Hal ini terbukti dengan masih tingginya persepsi klientalisme di berbagai daerah, khususnya yang

memiliki tingkat ketimpangan sosio-ekonomi yang tinggi.<sup>36</sup> Munculnya sosok populis yang dipersepsikan terlepas dari praktik klientalisme ini akan diterima baik bagi pemilih di atas.

*Keempat*, berkelindan dengan politik klientalisme, adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem kepartaian dan parpol sebagai instrumen representasi kepentingan rakyat menjadika sosok populis lebih meyakinkan untuk merangkul aspirasi pemilih. Alasan itu didasari dengan kuatnya dominasi oligarki dan elit-elit dalam tubuh partai politik baik di level nasional dan daerah dalam menentukan arah kebijakan dan laju partai, yang mana selalu diperuntukkan bagi pencapaian kepentingan partisan oligarkis dengan mengeksploitasi jaringan patronase yang terdesentralisir.<sup>37</sup> Konsekuensi dari terpilihnya politisi produk oligarkis yaitu kebijakan dan program yang berorientasi pada pengukuhan *status-quo* dan kepentingan ekonomi dan politik oligarkis penguasa. Dominasi oligarki dan elit predadoris yang berserakan di setiap tingkat, termasuk segala turunan manifestasi politiknya seperti dinasti politik, telah lama membajak proses demokrasi dengan memanipulasi aspirasi masyarakat melalui promosi kerabat dekat dalam kandidasi calon legislatif dan eksekutif.<sup>38</sup>

36 Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

37 Noor, "Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia..,"

38 Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, 1st edition (Stanford, Calif: Stanford University Press, 2010). Calif, "number-of-pages": "264", "edition": "1st edition", "source": "Amazon", "event-place": "Stanford, Calif", "abstract": "This book is about how the design of institutional change results in unintended consequences. Many post-authoritarian societies have adopted decentralization—effectively localizing power—as part and parcel of democratization, but also in their efforts to entrench 'good governance.'" Vedi Hadiz shifts the attention to the accompanying tensions and contradictions that define the terms under which the localization of power actually takes place. In the process, he develops a compelling analysis that ties social and institutional change to the outcomes of social conflict in local arenas of power. Using the case of Indonesia, and comparing it with Thailand and the Philippines, Hadiz seeks to understand the seeming puzzle of how local predatory systems of power remain resilient in the face of international and domestic pressures. Forcefully persuasive and characteristically passionate, Hadiz challenges readers while arguing convincingly that local power and politics still matter greatly in our globalized world.", "ISBN N": "9780804768535", "shortTitle": "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia", "language": "English", "author": [{"family": "Hadiz", "given": "Vedi R."}], "issued": [{"date-parts": [{"

sians have access to financial and physical assets (such as land and property

35 Christian von Luecke, "The Politics of Reform: Political Scandals, Elite Resistance, and Presidential Leadership in Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 29, no. 1 (March 1, 2010): 79–94, <https://doi.org/10.1177/186810341002900104>.

Kebijakan yang dihasilkan dari praktik politik demikian telah menciptakan frustrasi publik yang dapat diterjemahkan sebagai ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, elit politik berkuasa, dan jejaring formal dan informal utamanya diberbagai lembaga demokrasi. Ketidakpercayaan ini terrefleksi jelas dalam survei ahli yang dilakukan LIPI terkait kondisi politik menjelang pemilu serentak 2019, dimana kinerja partai politik dan DPR sebagai lembaga demokrasi masing-masing mendapatkan penilaian terburuk yaitu sebesar 13.10 persen. Sedangkan rendahnya edukasi pemilih dan politik uang merupakan salah satu problem potensial terbesar yang diasosiasikan sebagai tanggungjawab utama partai politik.<sup>39</sup>

Faktor-faktor diatas menunjukkan bagaimana kompleksitas politik yang mengkondisikan preferensi pemilih memberikan peluang dan nilai tawar lebih tinggi pada kandidat dari pendekatan sosiologis, psikologis, maupun rasional.<sup>40</sup> Jokowi memang mencakup banyak kekuatan disemua aspek dibandingkan Prabowo. Secara sosiologis, latar belakang pribadi Jokowi yang tumbuh dari masyarakat kelas menengah bawah di Solo yang kental dengan kultur Jawa santun, yang mana aspek ini memiliki kesamaan dengan pengalaman kolektif dan kondisi sosio-ekonomi moderat mayoritas rakyat Indonesia. Secara psikologis, persepsi publik terhadap Jokowi cenderung positif karena citranya sebagai politisi produk era reformasi yang bersih dari korupsi, terutama faktor rekam jejaknya di dunia pemerintahan lebih mengutamakan isu-isu populis seperti pelayanan publik, pengangguran, dan reformasi birokrasi. Secara pilihan rasional, politik pragmatis Jokowi fokus pada kebijakan teknokratis yang berorientasi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi menjadi tawaran politik yang menggiurkan bagi publik yang selama ini terjebak dalam praktik birokrasi

formalitas dan politik seremonial yang retorik tanpa aksi.

Sedangkan, citra Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan karismatik hanya menonjol bagi kalangan tertentu, khususnya yang memiliki ikatan kuat dengan sentimen anti-asing, militeristik, dan primordialis lainnya. Mengingat secara sosiologis, latar belakang personal Prabowo merupakan politisi elit lahir dari keluarga pejabat, besar dari karir militer era Orde-Baru, dan memiliki kekuasaan ekonomi yang besar. Dengan begitu, kondisi ini tentu menguntungkan Jokowi karena citra Prabowo sebagai sosok elit parpol dan bagian dari rezim otoriter memberikannya peluang untuk mempromosikan diri sebagai politisi yang berasal dari rakyat biasa "*common people*" dan terbebaskan dari keresahan dan ketidakpercayaan publik terhadap praktik politik gelap yang kian merajalela. Selain itu, kebosanan masyarakat terhadap wacana retorik tanpa aksi menjadi strategi "tindakan populis" Jokowi lebih bekerja baik dalam mempengaruhi preferensi pemilih median.

### **Dinamika Kompetisi Populisme Menuju Pemilu 2019: Transformasi Populisme dan Konsekuensinya**

Kemenangan Jokowi telah memunculkan optimisme dan harapan besar akan terciptanya transformasi politik. Mengingat kemenangannya selalu diasosiasikan pada kemenangan demokrasi karena kepresidenannya di hasilkan dari pendakian berjenjang dari mekanisme demokrasi dalam mengapai tapuk kekuasaan tertinggi secara *bottom-up*. Disamping, kemenangannya mencerminkan bekerjanya sistem desentralisasi politik dalam menjaring pemimpin potensial, realitas demokrasi ini menciptakan posibilitas baru bagi masa depan politisi non-elit untuk memenangkan pemilu melalui pemanfaatan strategi politik yang *legitimate* dan mampu melampaui hambatan patronase predatorial dan terkaman oligarki.<sup>41</sup>

Penjaringan calon pemimpin berdasarkan "sistem merit" melalui mekanisme pemilihan

2010",1,26]]}},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

39 Tim Survei Ahli P2P LIPI, "Pandangan Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019" (Politics, Agustus 2018).

<sup>40</sup> Jocelyn A. J. Evans, *Voters and Voting: An Introduction*, First edition (London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications Ltd, 2004).

<sup>41</sup> Hadiz and Robison, "Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia"; Mietzner, "Reinventing Asian Populism..,"

langsung mulai menjadi tren baru dalam kandidasi politik ditengah kerentanan pembajakan elit oligarkis dalam tubuh parpol. Secara lebih substansial, terpilihnya sosok pemimpin populis dapat diinterpretasikan bahwa populisme dapat menjadi strategi ampuh untuk membuat praktik politik uang dan patronase politik sebagai instrumen kemenangan pemilu mulai tampak usang dan mandul. Setidaknya efektivitas produk klientalisme sebagai faktor utama dalam mengkompromikan ketidakpuasan dan kekecewaan publik terhadap representasi parpol di institusi negara tersebut dianggap semakin menurun.<sup>42</sup>

Walaupun demikian, pada perkembangannya Jokowi mulai terjebak pada politik gaya lama dan optimisme akan terciptanya reformasi politik diawal pemerintahannya mulai terabaikan. Hal ini terlihat dari konsolidasi kekuasaannya dengan jejaring oligarki dan elit politik tradisional untuk mengamankan dukungan parlemen demi menjaga kebijakan populis pemerintah dari interupsi oposisi dan bahkan koalisi sendiri, serta untuk menjaga kredibilitas populer pada publik. Akan tetapi, reformasi dan pendalaman prinsip demokrasi dalam institusi politik seakan tidak diprioritaskan dalam pemerintahan Jokowi hal tersebut tampak dari kasus penunjukan Budi Gunawan dan kriminalisasi KPK. Akibatnya, bukan hanya tingkat penerimaan Jokowi di tahun pertama sangat rendah dibandingkan tahun pertama SBY di dua periode,<sup>43</sup> tetapi juga pembelahan sosial politik semakin tajam diakar rumput antara pro-pemerintah dan oposisi berdasarkan pilihan politik Pilpres 2014 lalu. Efek polarisasi sosial yang dihasilkan konstestasi kekuasaan ini terus berlanjut dalam membentuk dinamika politik di periode pertama Presiden Jokowi. Pada tahap ini, kehidupan politik bukan lagi diartikan sebagai upaya untuk memajukan kepentingan bersama melalui pertarungan gagasan dan kebijakan secara konstruktif, tetapi telah berubah menjadi ajang pertarungan politik berbasis emosional antar masyarakat

yang terfragmentasi akibat perbedaan dukungan terhadap sosok capres dan koalisi parpol pengusung.

### ***Titik Kritis dan Transformasi Persaingan Populisme***

Berkaitan dengan kondisi ini, instrumentalisasi populisme dalam pilpres lalu ternyata berimplikasi pada terciptanya polarisasi sosial yang semakin tajam dimana sentimen primordial yang eksklusiver menjadi basis pembelahan politik. Hal tersebut tampak dari berkembangnya politisasi identitas sebagai instrumen kontestasi politik yang ampuh untuk menjegal potensi kemenangan kandidat rival secara instan. Proses mobilisasi elektoral ini mengeksploitasi ikatan identitas kultural dan agama yang bertumpu pada legitimasi berbasiskan nilai-nilai subyektif absolut yang berkelindan dengan pengalaman atau persepsi negatif massa simpatisan atas entitas lawan secara spesifik, tren ini berkembang luas di beberapa daerah. Ironisnya, politisasi sentimen identitas sempit ini dibarengi dengan penggunaan narasi-narasi permusuhan dan artikulasi yang mengandung kebencian antar sesama warga negara.<sup>44</sup> Kecenderungan ini terbukti pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dimana rangkaian protes Aksi Bela Islam “411” dan “212,” diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), terhadap kasus “Al-Maidah 51” menyebabkan pembalikan dominasi elektoral pasangan Anies–Sandi<sup>45</sup> atas Ahok–Djarot yang sebelumnya selalu unggul dalam berbagai rilis survei.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Mouliza K.D Sweinstani and Rury Uswatun Hasanah, “Integrasi Nasional Dan Eksklusionalisme Identitas Dalam Pilkada 2017: Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, Dan Kalimantan Barat,” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 2 (2017): 185–98.

<sup>45</sup> “Mardani Akui Manfaatkan Aksi 212 Untuk Menangkan Anies-Sandi,” *CNN Indonesia*, December 7, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180712200852-32-313676/mardani-akui-manfaatkan-aksi-212-untuk-menangkan-anies-sandi>, diakses pada 12 April 2019.”URL:”<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180712200852-32-313676/mardani-akui-manfaatkan-aksi-212-untuk-menangkan-anies-sandi>,”issued”:{“date-parts”:[["2018",12,7]]},”accessed”:{“date-parts”:[["2019",3,16]]}},”schema”:{“https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}}

<sup>46</sup> “Enam Lembaga Rilis Hasil Survei Pilkada DKI, Ahok Unggul,” *Tempo*, January 29, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-ultima-ii-yang>

<sup>42</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia..,”

<sup>43</sup> Burhanuddin Muhtadi, “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, no. 3 (September 2, 2015): 349–68, <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110684>.

Terlepas dari perdebatan mengenai fenomena-fenomena diseperti Pilkada DKI Jakarta 2017 seperti kebangkitan gerakan sosial Islam atau Islamis radikal, sentimen anti-Ahok/Cina, dan pertentangan antara Pancasilais dan Islamis, kompleksitas peristiwa ini jelas telah menjadi titik kritis (*critical juncture*) bagi politik elektoral di Indonesia kontemporer, spesifiknya konfigurasi politik populis. Sejauh ini, populisme memiliki pola kebergantungan (*path-dependency*) pada strategi mobilisasi populer berlandaskan narasi-narasi nasionalisme dan demokrasi dalam kontestsai politik, namun pasca Pilkada ini terinvalidasi oleh menguatnya narasi konservatisme Islam yang digaungkan oleh gerakan populisme Islam sayap kanan dan aliansi politiknya, kubu oposisi. Realitas ini disebabkan oleh meningkatnya kapasitas organisasional populisme Islam dalam memobilisasi dukungan populer dengan ikatan yang lebih solid dengan massa Muslim, mayoritas *median voters*. Peningkatan ini tidak lain karena basis sosial gerakan populis Islam ini semakin memperluas jangkauan pada dukungan kaum terdidik dan kelas menengah perkotaan.<sup>47</sup>

Berkaca dari Pilkada DKI, kekuatan populisme Islam sangat berpengaruh dalam mengintervensi pilihan dan arus politik di akar rumput, dimana wacana perjuangan “umat” yang dikumandangkan merupakan basis legitimasi bagi strategi politiknya dalam memobilisasi dukungan elektoral dari warga Muslim.<sup>48</sup> Pengaruh wacana tersebut semakin kuat karena adanya upaya yang mempertautkan antara narasi moralitas keIslaman dan pembelaan agama dengan persepsi massa Muslim yang mengalami marginalisasi dari politik arus utama dan ketimpangan sosio-ekonomi. Kesesuaian persepsi dan narasi ke-umatan selanjutnya menciptakan situasi “*suspension of difference*” yang merekatkan solidaritas dan visi Muslim dari tingkat kelas dalam mengkonfrontasi musuh bersama, yaitu

Ahok, dengan artikulasi kekecewaan yang mana juga beresonansi kuat dengan gerakan populis Islam. Kondisi ini memberikan celah yang sangat besar bagi logika populisme untuk bekerja dengan mendikotomikan masyarakat secara moralitas dan identitas keyakinan dalam kerangka Islam; yaitu adanya konstruksi antara “umat bermoral” melawan “elit rezim zalim” sebagai definisi dasar untuk mengidentifikasi antara kelompok yang “berjuang membela Islam” dan “berpihak pada elit rezim zalim anti-Islam.”<sup>49</sup> Fatalnya, polarisasi ini diikuti infiltrasi narasi-narasi permusuhan dan ketakutan yang non-demokratis dan bernuansa nativistik eksklusiver dibanyak ruang publik baik daring dan luring.

Terciptanya konstruksi dalam persepsi massa Muslim tersebut menjadikan efektivitas strategi mobilisasi elektoral berbasiskan identitas agama semakin tidak terbendung dalam pemilu. Apalagi dengan adanya konstruksi populis tandingan yang menentang pengguna politik identitas dengan dikotomi “Pancasilais” dan “anti-kebhinnekaan/intoleran,” yang mengidentikkan kelompok anti-Ahok/pendukung gerakan Islam sebagai kaum intoleran. Pembelahan sosial yang didefinisikan oleh kompetisi aktif antar politik populis nasionalis dan Islam ini menimbulkan efek yang semakin mempertajam perbedaan ideologis diakar rumput. Yaitu munculnya pergeseran tujuan gerakan sosial Islam anti-Ahok dari aktivisme perjuangan keadilan menjadi mesin kampanye pemenangan kandidat pesaing, utamanya yang mengartikulasikan retorika politik akomodasionis terhadap kepentingan umat Islam, demi menjegal petahana yang diasosiasikan bagian dari pemerintah sekuler yang anti-Islam dan pro-asing/Cina. Alhasil polarisasi sosial tegas yang semakin rawan ini tidak hanya terbagi atas dasar perbedaan preferensi sosok politik saja, tetapi juga justifikasi moralitas keagamaan dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Dari pengalaman Pilkada Jakarta ini terlihat bahwa politik populisme Islam telah mentransformasi signifikansi Islam dalam corak politik arus utama. Yaitu mempertegaskan kembali akan posisi elemen-elemen Islam sebagai standar normatif yang membentuk dan

---

disetujui-prabowo/full&view=ok, diakses pada 13 Mei 2019.

<sup>47</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia..,”

<sup>48</sup> Ahmad Imam Mujadid Rais and Zainal Abidin Bagir, “Setelah ‘Bela Islam’: Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial: Suatu Pengantar,” *Maarif Institute* 11, no. 2 (Desember 2016): 4–14.

---

<sup>49</sup> Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge University Press, 2016).

mendikte orientasi beragam manuver politik semua kontestan pemilu baik itu eksekutif dan legislatif ataupun dari kubu koalisi pemerintah dan oposisi. Diskursus Islam dalam kontestasi politik pada akhirnya menjadi faktor determinan dalam menjamin tercapainya target elektoralisme pada edisi pemilu mendatang, di 2018 dan 2019. Keadaan ini memaksa elit-elit politik sekuler untuk menyesuaikan gaya politiknya dengan nilai-nilai keIslaman yang menegaskan kembali unsur-unsur religiusitas dan kesalehan yang kental, meski terbatas pada ekspresi simbolis dan impersonasi semata. Pentingnya penyesuaian (*adjustment*) terhadap elemen Islam secara proaktif ini sekaligus menjadi menjadi pendongkrak daya saing dan posisi tawar populisme Islam yang menjanjikan dalam politik arus utama. Meskipun ironisnya, populisme Islam juga tidak bebas dari cengkraman kepentingan elit predatoris diberbagai kubu politik dengan indikasi bahwa jaringan oligarki turut mengafirmasi wacana konservatisme berbasis identitas religius yang ditawarkan gerakan alumni “212” guna mengkonsolidasikan kekuatan politik oposisi dan populisme Islam untuk mengamankan konstituensi massa Muslim.

Titik kritis transformasi populisme di Indonesia yang ditandai dengan penguatan politik identitas ini menempatkan polarisasi berbasis sentimen religius sebagai prakondisi dari efektivitas strategi populis dalam mobilisasi elektoral. Terbentuknya prakondisi elektoral diatas telah terbukti menguntungkan strategi politik kubu oposisi pimpinan Prabowo di Pilkada DKI dan seakan-akan terus dipelihara dalam menjaga ritme politik sentimental yang potensial untuk memenangkan pemilu presiden 2019 mendatang. Strategi di Pilkada DKI tetap menjadi formula dasar bagi kubu oposisi dimana modal politik populis Prabowo sebagai pemimpin patriotik dan merakyat kembali digalak pada konstituensi, tetapi kali ini dikombinasikan dengan unsur moralitas keagamaan dan simbolisme Islam.

Berangkat dari asumsi *elite adjustment*,<sup>50</sup> langkah penyesuaian strategis demikian

disesuaikan dengan realitas tren pemilih di Indonesia yang masih sangat mempertimbangkan aspek identitas religius dari kandidat presiden dan wakil presiden pilihan. Kecenderungan ini akan memperkuat formulasi taktik Prabowo untuk memperkuat konstruksi narasi-narasi berbasis politik identitas dengan tetap menempatkan posisi Jokowi dan koalisi parpol pengusungnya pada pemeran antagonis bagi kepentingan “umat” Islam. Sebagaimana yang didemonstrasikan Amien Rais, aliansi oposisi, dalam membedakan parpol oposisi anti-Ahok (Gerindra, PKS, dan PAN) sebagai “partai tuhan” dan parpol pengusung gubernur DKI petahana sekaligus koalisi Jokowi sebagai “partai setan.” Operasionalisasi siasat tersebut merupakan kontinuitas upaya oposisi untuk mengkonsolidasikan dukungan dan kapasitas mobilisasi konstituensi Muslim dari berbagai segmen Islam sayap kanan baik tradisional, konservatif, fundamentalis maupun radikal,<sup>51</sup> termasuk dengan menyelipkan narasi bernuasa politik programatik dalam instrumen populis pendukungnya seperti pada kampanye #2019gantipresiden diberbagai daerah.

Kulminasi dari penyesuaian populisme ultranasionalis Prabowo terhadap konservatisme Islam termanifestasi dalam hasil Ijtima Ulama jilid dua versi GNPF yang menetapkan Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres pilihan koalisi umat.<sup>52</sup> Walaupun narasi yang dimunculkan pada penetapan Sandiaga sebagai pendamping diartikulasikan dengan kesan politik programatik dibandingkan politik identitas primordial, kubu Prabowo tetap mengklaim sebagai representasi kehendak rakyat dan umat Islam yang berpihak kepentingan bangsa.

Sebaliknya, situasi pasca Pilkada DKI dan penahanan Ahok menempatkan Jokowi dalam keadaan terdesak karena kredensial Islam yang dimiliki petahan sangat lemah. Walaupun

<sup>51</sup> Thomas P. Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (September 2, 2018): 307–38, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.

<sup>52</sup> “17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Disetujui Prabowo,” *Tempo*, September 16, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-yang-disetujui-prabowo/full&view=ok>, diakses pada 12 Mei 2019.

<sup>50</sup> Permana, “Local Elite Adjustment in Indonesia’s Democratization: Case Studies of North Sumatra and East Java, 1998-2013...,”

elektabilitasnya masih dominan, populisme teknokratik Jokowi yang beraroma nasionalis sekuler tidak cukup kuat untuk mengamankan dukungan pemilih Islam dalam memuluskan lajunya di edisi pemilu selanjutnya. Serta, minimnya modal politik yang terkonsolidasikan dengan konstituensi Muslim menguatkan citra pemerintahan Jokowi yang tidak ramah pada Islam dan label anti-Islam yang disematkan oleh kelompok Islam kanan. Tentu kekhawatiran akan adanya keberlanjutan serangan politik sektarian dan mobilisasi sentimen massa ini menjadi alasan yang memaksa Jokowi melakukan duplikasi strategi kubu oposisi dengan menyesuaikan gaya politik populisnya selaras dengan preferensi umat Islam. Pertimbangan tersebut melahirkan strategi akomodasionis Jokowi terhadap kelompok Islam konservatif arus utama tetapi dalam spektrum yang lebih moderat seperti, tidak terbatas pada, NU dan Muhammadiyah<sup>53</sup> demi menjaga inklusivitas dari populisme teknokratisnya.

Strategi akomodasi ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan dukungan kelompok Islam secara proaktif melalui berbagai cara. Mulai dari pengayoman aspirasi ormas Islam mainstream, perekatan relasi personal dengan ulama terkemuka dan tokoh Islam populer, perangkulan figur Muslim oposisi yang menonjol ke dalam pemerintahan, sampai pada pengartikulasian kepentingan yang bernuansa islami dan berkesinambungan dengan agenda masyarakat sipil Islam arus utama. Puncak dari kalkulasi taktis Jokowi dalam menepis tuduhan ketidakberpihakannya pada umat Islam, terletak pada keputusannya untuk menggandeng simbol konservatisme Islam pada kasus Ahok, KH Ma'ruf Amin, sebagai cawapres pendampingnya di pemilu 2019. Sementara itu, strategi represi selektif juga diadopsi petahana dalam membendung arus serangan politik yang dimunculkan kubu oposisi dan gerakan populis Islam fundamentalis yang dianggap radikal bagi stabilitas rezim. Tetapi strategi ini cenderung menginstrumentalisasi perangkat regulasi dan hukum serta memobilisasi aparat keamanan negara dalam mengatasi tekanan rival politik. Tujuan lain dari strategi tentu memecah soliditas

internal dan menkooptasi motor penggerak gerakan 212 guna melemahkan kekuatan aliansi politik kubu oposisi dengan populisme Islam.<sup>54</sup>

### ***Konsekuensi Perubahan Populisme: Perbauran Ideologis dan Dominasi Oligarki***

Pada tahapan ini, dapat dikatakan bahwa konsekuensi dari fenomena politisasi identitas berbasis sentimen keagamaan di pilkada daerah berhasil mentransformasi gaya politik kontestan di pemilu nasional. Perubahan ini terlihat dari pengeksploitasian retorika dan simbol-simbol Islam yang sangat jelas dalam tampilan kampanye politik kedua kandidat, mulai dari jargon-jargon yang Islami sampai pada praktek superfisial penanda ketaatan Muslim. Populisme teknokratik-inklusif Jokowi dan populisme ultranasionalis-konfrontatif Prabowo sama-sama menyerap unsur Islam dalam strategi mobilisasi elektoralnya, termasuk pengkonstruksian narasi “keberpihakan umat” dalam moda interaksi kedua capres untuk menarik suara konstituen Muslim. Dengan begitu, terlihat bahwa upaya saling umbar citra kesalehan dan keberpihakan pada aspirasi umat Islam muncul pada tindakan kedua kontestan menjadikannya sebagai instrumen baru dalam persaingan populisme menjelang pemilu 2019.

Simbolisme Islam yang dimanfaatkan sebagai konfirmasi akan bentuk kesalehan sedikit banyak menyetarakan posisinya dengan citra nasionalisme kerakyatan sebagai unsur dasar pada narasi-narasi politik yang ditandingkan seperti edisi Pilpres 2014. Pemutakhiran moda interaksi ini juga dilakukan sebagai penguatan *media logics* dalam strategi populis kedua kubu khususnya pada basis suara lawan. Prabowo cenderung bergantung pada basis suara Islam konservatif dan Jokowi pada pemilih di daerah miskin pinggiran (*rural poor*).<sup>55</sup>

Proses pemutakhiran tersebut dapat dilihat dari segi impresi yang dibangun. Jokowi yang populer dengan ikon “kemeja kotak-kotak” sebagai simbol kerakyatannya pada kampanye politik seakan ditanggalkan dan diganti dengan

<sup>53</sup> Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline..”

<sup>54</sup> Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline..”

<sup>55</sup> Gueorguiev, Ostwald, and Schuler, “Rematch..”

seragam putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan jiwa demi menyesuaikan preferensi pemilih Islam dan menepis serangan anti-Islam.<sup>56</sup> Sedangkan, Prabowo yang mengindentikkan diri pada simbol-simbol pemimpin karismatik–patriotik dengan seragam ala Sukarno tidak lagi digunakan dan lebih banyak menyoroti permasalahan dan disfungsi kebijakan petahan. Fokusnya Prabowo pada isu-isu seputar ekonomi kerakyatan daripada narasi keIslaman merupakan sinyalmen akan usahanya untuk mengoptimalisasi basis suara didaerah miskin pinggiran. Dari dinamika diatas dapat dilihat jelas bahwa kedua kubu mengadopsi dua strategi “penyesuaian elit” yang dimainkan pada tataran prosedur kampanye elektoral yaitu taktik “penerimaan simbolis” diatas dan taktik “pemimikan isomorfis,” dimana setiap kandidat populis menggunakan upaya impersonifikasi sosok pemimpin bangsa yangn ideal bagi umat Islam di Indonesia, untuk menggalang dukungan elektoral dari pemilih mayoritas.

Walaupun kecenderungan dari transformasi populisme mengindikasikan gaya politik populis ke arah yang lebih religius, kedua kubu kandidat masih mempertahankan akan pentingnya nasionalisme kebangsaan dalam fondasi ideologis utama dari visi politik yang ditawarkan pada konstituen. Strategi penyesuaian kedua populisme nasionalis ini terhadap posisi tawar politik identitas yang semakin besar memberikan kesan bahwa penetrasi pengaruh konservatisme Islam pada institusi politik fomal semakin dalam. Namun, trajektori historis memperlihatkan bagaimana prospek politik Islam selalu berada diluar kemapanan sistem politik formal dan hanya menjadi instrumen elektoralisme belaka. Pasca kontestasi usai pengaruh Islam akan kembali termarginalkan dalam proses pembangunan institusi demokrasi formal. Indikasi periperalisasi Islam pun telah terjadi antar parpol intra-koalisi oposisi terkait preferensi kebijakan diparlemen seperti perbedaan pandangan terhadap RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Perlindungan Ulama antara Gerindra dan PKS.<sup>57</sup>

Dengan adanya kecenderungan yang tidak sesuai antara narasi kampanye dan praktik formulasi kebijakan ini mengindikasikan akan meningkatkan proses “superfisialisasi atau pendangkalan” diskursus Islam dalam politik elektoral di Indonesia. Proses ini merujuk pada proses instrumentalisasi ide dan diskursus Islam/keagamaan sebagai motor penggerak dalam penggalangan suara massa Muslim dengan mengeliminir substansi dari ide-ide tersebut dalam visi politik dan kebijakan yang diprioritaskan dalam institusi arus utama. Sehingga, konsekuensi *pertama* dari transformasi populisme yaitu “pendangkalan” peran Islam dalam kehidupan politik arus utama yang hanya menjadi instrumen elektoralisme, meski pengaruh Islam masih menjadi faktor penting dalam retorika dan narasi politik populisme.

Selanjutnya, konsekuensi *kedua* yang tercipta dari transformasi populisme ini yakni perbauran ideologis yang mana mengaburkan batas tegas dalam spektrum politik di Indonesia antara pancasilais (nasionalis) dan Islam. Seperti pada **Gambar 1**, peleburan ideologi tersebut jelas terjadi pada pemilu 2019 saat ini, dimana tindakan strategis parpol dalam mengusung kandidat pemimpin tidak lagi ditentukan oleh perbedaan ideologi atau preferensi kebijakan, tetapi lebih dibentuk atas kesamaan kepentingan dan kalkulasi pragmatis terhadap potongan “kue” politik yang didapat atau *cartel-seeking coalition*. Hasilnya tentu tidak lain adalah komposisi parpol “pelangi atau nano-nano” yang berisi kemajemukan ideologi baik itu Islam maupun nasionalis sekuler.<sup>58</sup> Begitu pula spektrum pendukung non-partai, pembelahan sekuler-liberal dan konservatif tampak berbaur secara harmonis di dua kubu kandidat populis, dimana kelompok Islamis bisa berdiri sejajar

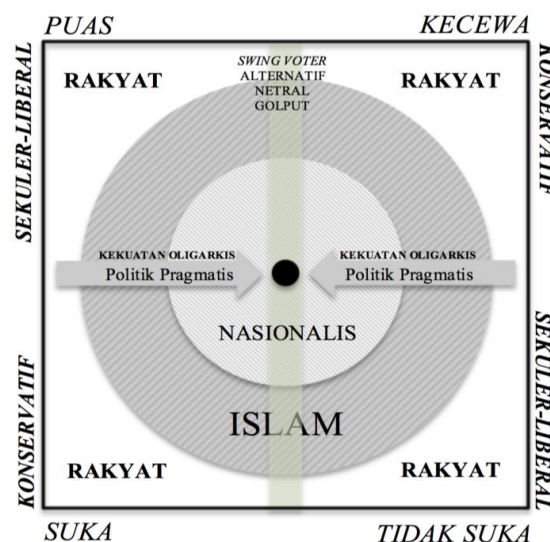
<sup>56</sup> “Kampanye Baju Putih, Jokowi Dinilai Hendak Simbolkan Dirinya Bersih,” *KOMPAS.com*, March 27, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/15041021/kampanye-baju-putih-jokowi-dinilai-hendak-simbolkan-dirinya-bersih>, diakses pada 30 Maret 2019.

<sup>57</sup> Aziz Anwar Fachrudin, “Questioning Prabowo’s Alliance with Islamists,” *New Mandala* (blog), March 15, 2019, <https://www.newmandala.org/questioning-prabowos-alliance-with-islamists/>, diakses pada 28 Maret 2019.

<sup>58</sup> Moch Nurhasim, “Koalisi Nano-Nano Pilkada 2018: Sebuah Analisis,” *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (December 31, 2018): 129–42, <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.760>; Edward Aspinall et al., “Mapping the Indonesian Political Spectrum,” *New Mandala* (blog), April 24, 2018, <https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/>.

dengan kelompok liberal dibelakang Prabowo-Sandi dalam menentang tindakan pemerintah petahana yang dianggap “dungu” dengan narasi “akal sehat,” sedangkan kelompok konservatif tradisional bisa bergandengan tangan kelompok pro-Ahok dalam mendukung kemenangan Jokowi-Amin.

Pada akhirnya, perbauran dukungan, narasi, dan aktor lintas ideologi yang melampaui spektrum politik ini pada dasarnya hanya ikut mendorong kandidat populis menuju inti konstestasi politik, kekuasaan, secara pragmatis dengan ikut memobilisasi suara rakyat yang terfragmentasi, terlihat di **Gambar 1**. Polarisasi politik ini hanya menyisakan celah kecil dan marginal bagi pemilih yang tidak ingin terseret dalam dikotomi, *undecided*, netral atau memilih atas dasar pertimbangan personal, golput/*rational non-voters*, dan pemilih yang berafiliasi dengan gerakan arus politik tradisi liberal yang kuat atau progresif diluar kemapanan sistem politik, yang mana tetap ingin mengedepankan pandangan kritis dan normatif dalam menyikapi konstestasi kekuasaan yang pragmatis ini. Perbauran ini memang cukup menyulitkan kita untuk mengkategorikan alasan dukungan pemilih berdasarkan pembelahan (*cleavage*) antara preferensi kebijakan dan ideologi di pemilu kali ini, khususnya capres dan cawapres. Yang jelas, preferensi pemilih hanya dapat diidentifikasi oleh faktor *emosional-subyektif* (suka-tidak suka) pada personal secara dominan dan faktor *rasional-objektif* (puas dan kecewa) terhadap kinerja. Meskipun begitu, ada kecenderungan faktor rasional dibentuk atas faktor emosi pemilih yang tidak murni objektif dalam menentukan atau mengubah pilihan pemilih.<sup>59</sup>



**Gambar 1.** Ilustrasi Perbauran Ideologi, Preferensi Politik Pemilih, dan Peran Oligarki

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Dampak *terakhir* dari berubahnya populisme ini yaitu pelanggaran dominasi oligarki yang semakin mengakar kuat disetiap lini kehidupan politik Indonesia, disamping absennya kekuatan politik progresif emansipatoris sebagai kekuatan penyeimbang. Umumnya populisme dipandang sebagai kekuatan reformis untuk mengkonfrontasi pengaruh oligarki, tetapi pada kasus Indonesia kelompok oligarki menyesuaikan konteks sosial politik pemilih dengan mengadopsi populisme dan strategi mobilisasinya dalam mempertahankan *status-quo*nya baik ditataran struktural maupun elektoral. Wujud penyesuaian oligarkis tersebut dapat berupa konflik proksi yang melibatkan fraksi elit-elit politik atau nominasi sosok populer, kader atau non-kader, yang diterima luas di akar rumput, melalui konstruksi retorika populis dan narasi-narasi reformis dan revolusioner dengan mengeksplorasi aspek emosi pemilih sebagai prakondisi mobilisasi populis.<sup>60</sup> Upaya ini bertujuan untuk menyamarkan siasat dan kepentingan oligarki dari interupsi rakyat dengan menarik perhatian dan simpati masyarakat terhadap dinamika kontestasi elektoral yang berlangsung melalui berbagai manuver politik pragmatis antar kubu populis.

<sup>59</sup> LPPUI, “What’s The Main Driver of Voting Intention in Indonesia’s Presidential Election? Temuan Survei 4 Provinsi Di Pulau Jawa” (March 8, 2019).

<sup>60</sup> Hadiz and Robison, “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia.”

Hal ini tergambar jelas dari dua edisi pemilu presiden dengan nominasi Prabowo yang dipandang sebagai kandidat populis yang merepresentasikan kepentingan oligarki penyokongnya<sup>61</sup> seperti Hashim Djojohadikusumo. Begitu pula dengan Jokowi yang dipandang sebagai presiden “petugas” partai, walaupun secara personal ia merupakan *outsider* dari klub Oligarki tetapi langkah politik dan arah pemerintahannya sesuai dengan arahan kepentingan elit parpol dan oligarki penyokong, sebut saja Surya Paloh, Harry Tanoe.<sup>62</sup> Pada konstelasi politik elektoral pemilu 2019, kita menyaksikan bagaimana upaya saling serang antar kedua paslon lebih fokus pada kelemahan personal dan basis pendukung kedua kandidat, tetapi sorotan terhadap permasalahan negara yang berdampak negatif terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, yang disebabkan langsung oleh korporasi-korporasi dari jejaring oligarki pendukung mereka<sup>63</sup> seakan bukan menjadi persoalan genting bangsa yang menjadi perhatian publik banyak dan tidak lebih penting dibandingkan peluang terpilihnya kandidat pilihan mereka dan kekhawatiran yang akan malapetaka yang akan terjadi jika kandidat rival terpilih.

Dari **Gambar 1** juga jelas bahwa kepentingan faksi oligarkis kedua kubu menjadi kekuatan pendorong dukungan elektoral paslon menggunakan daya tarik populis untuk inti kekuasaan dengan mengeksploitasi berbagai aspek seperti politik identitas, relasi klientalistik, prestasi dan *personality* kandidat secara pragmatis. Upaya tersebut mengartikan bahwa populisme merupakan wahana yang diinstrumentalisasi untuk menunaikan tuntutan elektoralisme, kemenangan, secara temporer untuk menjamin strategi mobilisasi suara dilapangan bekerja dengan baik. Terserapnya simpati dan partisipasi aktif publik dalam agenda politik kandidat mengindikasikan bagaimana proyek politik

populisme di Indonesia berhasil terappropriasi oleh kepentingan elit dan oligarki penyokong demi memastikan dominasinya tetap bertahan dalam konteks politik yang dinamis. Akibatnya, kontestasi elektoral hanya direduksi menjadi arena pertarungan politik pragmatis semata daripada sebagai instrumen transformasi politik secara sistemik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya. Hasilnya, suara rakyat diartikan bukan sebagai aspirasi yang wajib dikonversikan ke dalam basis legitimasi kebijakan yang diimplementasikan secara holistik dan inklusif tetapi instrumen pencapaian kekuasaan dari pada. Dengan kata lain *vote* gagal diterjemahkan sebagai *voice*.

## Penutup

Bangkitnya populisme di Indonesia kontemporer mengindikasikan adanya perubahan yang mencolok dimana figur pemimpin karismatik yang dipersepsikan sebagai *common people* atau kepanjangan suara rakyat menjadi faktor determinan untuk mendominasi kontestasi politik. Didukung dengan narasi-narasi yang menyasar keresahan akar rumput dan beragam mesin politik, pemanfaatan *populist appeals* dalam strategi elit politik seakan menjadi situasi normal baru dan lumrah dalam dinamika elektoral karena terbukti efektif dalam kemenangan pemilu dibanyak tingkatan. Karakteristik populisme elitis (*elite-driven populism*) yang fleksibel menunjukkan bagaimana penggunaan politik populis selalu diadaptasikan dengan perubahan sosial dan turbulensi politik yang terjadi, meskipun terdapat kontradiksi yang mendasar dalam artikulasi visi, tindakan, aliansi politik, koalisi dan bahkan personal figur kontestan politik demi menyesuaikan dengan selera pemilih.

Konsekuensinya, instrumentalisasi populisme secara lentur dalam persaingan politik ini lebih banyak bergerak diarah prosedural dalam sistem demokrasi, walaupun harus diakui bahwa prosedur merupakan komponen penting dari substansi demokrasi itu sendiri. Namun, terlihat bahwa cita-cita prinsipil yang substansial dari demokrasi itu justru terabaikan dalam dinamika kontestasi yang mana akhirnya stagnasi demokrasi Indonesia yang terjadi

<sup>61</sup> Aspinall, “Oligarchic Populism.”

<sup>62</sup> Muhtadi, “Jokowi’s First Year”; Noor, “Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia.”

<sup>63</sup> “Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan Dan Ruang Hidup Warga,” Mongabay Environmental News, April 16, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan-dan-ruang-hidup-warga/>, diakses pada 12 Mei 2019.

selama ini terus berlanjut. Bahkan kedua paslon memberikan peluang akan kemunculan kekuatan yang melemahkan demokrasi baik itu bagi sistem, tata kelola, maupun kultur demokrasi yang ada di Indonesia. Sikap abai terhadap potensi ancaman tersebut dilatarbelakangi oleh motif untuk mengamankan posisi politik dan elektabilitas yang diuntungkan. Sebaliknya, publik belum melihat bagaimana prospek bagi pendalaman demokrasi, penguatan institusi, prinsip *rule of laws* dan keadilan itu terejawantahkan dalam kebijakan yang akan ditawarkan.

Implikasi dari kondisi ini menunjukkan bahwa populisme cenderung mengarahkan masyarakat pada pengkultusan sosok kandidat secara dramatis. Hal ini berefek pada tumpulnya daya nalar masyarakat untuk mengkritisi celah-celah produk dan proses pembuatan keputusan yang berpotensi negatif bagi kehidupan berpolitik. Tentunya situasi demikian tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia karena akan menyebabkan kemandegan proses *check and balance*, serta terbentuknya rasa ketidakpekaan warga negara terhadap kondisi ketidakadilan dan ketertindasan rakyat yang tercipta dari kebijakan yang ditawarkan pemerintahan populis ini. Dampak yang lebih berbahaya lagi yaitu terciptanya sikap antipati atau permusuhan kepada sesama warganegara yang berbeda pilihan dan pandangan politik dengan mengkonstruksikan narasi rawan seperti “*us versus them*” dalam polarisasi sosial ini.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Daigle, Delton T, Joséphine Neulen, Austin Hofeman, and Springer International Publishing AG. *Populism, Nativism, and Economic Uncertainty: Playing the Blame Game in the 2017 British, French, and German Elections*, 2019.
- Evans, Jocelyn A. J. *Voters and Voting: An Introduction*. First edition. London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications Ltd, 2004.
- Gherghina, Sergiu, Sergiu Mişcoiu, and Sorina Soare. *Contemporary Populism: A Controversial*

*Concept and Its Diverse Forms*. Cambridge Scholars Publishing, 2013.

- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press, 2016.
- . *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. 1st edition. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2010.
- Laclau, Ernesto. *On Populist Reason*. London; New York: Verso, 2005.
- Mudde, Cas. *Populist Radical Right Parties in Europe*. 1st edition. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007.
- Mudde, Cas, and Cristobal Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*. 2nd ed. edition. New York, NY: Oxford University Press, 2017.
- Taggart, Paul A. *Populism*. Open University Press, 2000.

### Jurnal

- Aspinall, Edward. “Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy.” *Indonesia* 99, no. 1 (May 29, 2015): 1–28. <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002>.
- Canovan, Margaret. “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.” *Political Studies* 47, no. 1 (March 1999): 2–16. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.00184>.
- Gagnon, Jean-Paul, Emily Beausoleil, Kyong-Min Son, Cleve Arguelles, Pierrick Chalaye, and Callum N. Johnston. “What Is Populism? Who Is the Populist?: A State of the Field Review (2008-2018).” *Democratic Theory* 5, no. 2 (December 1, 2018): vi – xxvi. <https://doi.org/10.3167/dt.2018.050201>.
- Gueorguiev, Dimitar, Kai Ostwald, and Paul Schuler. “Rematch: Islamic Politics, Mobilisation, and the Indonesian Presidential Election.” *Political Science* 0, no. 0 (March 22, 2019): 1–13. <https://doi.org/10.1080/00323187.2019.1584733>.
- Hadiz, Vedi R, and Richard Robison. “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia.” *International Political Science Review* 38, no. 4 (September 1, 2017): 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>.
- Inglehart, Ronald F., and Pippa Norris. “Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science

- Research Network, July 29, 2016. <https://papers.ssrn.com/abstract=2818659>.
- Luebke, Christian von. "The Politics of Reform: Political Scandals, Elite Resistance, and Presidential Leadership in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 29, no. 1 (March 1, 2010): 79–94. <https://doi.org/10.1177/186810341002900104>.
- McDonnell, Duncan, and Luis Cabrera. "The Right-Wing Populism of India's Bharatiya Janata Party (and Why Comparativists Should Care)." *Democratization* 26, no. 3 (April 3, 2019): 484–501. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1551885>.
- Mietzner, Marcus. "Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia." East-West Center, 2015. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/resrep06525>.
- Mudde, Cas. "The Populist Zeitgeist." *Government and Opposition* 39, no. 4 (September 2004): 542–63. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x>.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, no. 3 (September 2, 2015): 349–68. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110684>.
- Noor, Firman. "Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya." *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (December 29, 2017): 109–26. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.724>.
- . "Pilkada, Peran Partai Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim Tahun 2017-2018." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (December 31, 2018): 179–96. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>.
- Nurhasim, Moch. "Koalisi Nano-Nano Pilkada 2018: Sebuah Analisis." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (December 31, 2018): 129–42. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.760>.
- Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (September 2, 2018): 307–38. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Rais, Ahmad Imam Mujadid, and Zainal Abidin Bagir. "Setelah 'Bela Islam': Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial: Suatu Pengantar." *Maarif Institute* 11, no. 2 (Desember 2016): 4–14.
- Sil, Rudra, and Peter J. Katzenstein. "Analytic Eclecticism in the Study of World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research Traditions." *Perspectives on Politics* 8, no. 2 (2010): 411–31. <https://www.jstor.org/stable/25698610>.
- Sweinstani, Mouliza K.D, and Rury Uswatun Hasanah. "Integrasi Nasional Dan Eksklusionarisme Identitas Dalam Pilkada 2017: Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, Dan Kalimantan Barat." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 2 (2017): 185–98.
- Ziv, Daniel. "Populist Perceptions and Perceptions of Populism in Indonesia: The Case of Megawati Soekarnoputri." *South East Asia Research* 9, no. 1 (March 2001): 73–88. <https://doi.org/10.5367/000000001101297324>.

### Sumber lainnya

- "17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Disetujui Prabowo." *Tempo*, September 16, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-yang-disetujui-prabowo/full&view=ok>.
- Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton. "Mapping the Indonesian Political Spectrum." *New Mandala* (blog), April 24, 2018. <https://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/>.
- "Enam Lembaga Rilis Hasil Survei Pilkada DKI, Ahok Unggul." *Tempo*, January 29, 2017. <https://nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-yang-disetujui-prabowo/full&view=ok>.
- Fachrudin, Aziz Anwar. "Questioning Prabowo's Alliance with Islamists." *New Mandala* (blog), March 15, 2019. <https://www.newmandala.org/questioning-prabowos-alliance-with-islamists/>.
- "Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51." *Detiknews*, May 9, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>.
- Hamid, Abdul. "Observation of Democratic Decentralization in Indonesia during 2009-2014 : Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province." PhD Thesis, Doshisha University, 2015. <https://ci.nii.ac.jp/naid/500000978660>.
- "Kampanye Baju Putih, Jokowi Dinilai Hendak Simbolkan Dirinya Bersih." *KOMPAS.com*, March 27, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/15041021/kampanye->

- baju-putih-jokowi-dinilai-hendak-simbolkan-dirinya-bersih.
- Kurlantzick, Joshua. "Southeast Asia's Populism: On the Rise, But Different From Populism in Other Regions." *Council on Foreign Relations* (blog), November 1, 2018. <https://www.cfr.org/blog/southeast-asias-populism-rise-different-populism-other-regions>.
- LPPUI. "What's The Main Driver of Voting Intention in Indonesia's Presidential Election? Temuan Survei 4 Provinsi Di Pulau Jawa." Depok, March 8, 2019.
- "Mardani Akui Manfaatkan Aksi 212 Untuk Menangkan Anies-Sandi." *CNN Indonesia*, December 7, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180712200852-32-313676/mardani-akui-manfaatkan-aksi-212-untuk-menangkan-anies-sandi>.
- Margiansyah, Defbry. "Tantangan Masyarakat Islam di Eropa (Analisis Resistensi Kelompok Konservatif Terhadap Islam)." Universitas Pasundan, 2013.
- P2P LIPI, Tim Survei Ahli. "Pandangan Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019." Politics presented at the Rilis Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, Agustus 2018.
- Permana, Panji Anugrah. "Local Elite Adjustment in Indonesia's Democratization: Case Studies of North Sumatra and East Java, 1998-2013." Doctoral Dissertation, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 2017.
- Santoso, Purwo. "Artikulasi "People Power" Dalam Demokrasi Sumbang." *KOMPAS*, April 12, 2019. <https://kompas.id/baca/opini/2019/04/12/artikulasi-people-power-dalam-demokrasi-sumbang/>.
- "Sexy Killer, Ketika Industri Batubara Hancurkan Lingkungan Dan Ruang Hidup Warga." *Mongabay Environmental News*, April 16, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/04/16/sexy-killer-ketika-industri-batubara-hancurkan-lingkungan-dan-ruang-hidup-warga/>.
- World Bank. "Indonesia's Rising Divide." The World Bank, March 1, 2016. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>.

## TENTANG PENULIS

### **Efriza**

Penulis merupakan dosen tetap program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta. Beberapa tulisannya antara lain: “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik”, “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan”, “Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui email: efriza.riza@gmail.com

### **Luky Sandra Amalia**

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dan mendapatkan gelar Master of Development Studies dari Murdoch University. Bidang kajian yang diminati adalah mengenai pemilu dan gender. Berbagai tulisan mengenai pemilu dan perempuan dalam politik sudah dihasilkannya baik artikel jurnal maupun *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sandra\_thok@yahoo.com.

### **Sarah Nuraini Siregar**

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia:

Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

### **Defbry Margiansyah**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Agama dan Politik. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Ilmu hubungan Internasional Universitas Pasundan pada tahun 2013 dengan penelitian akhir mengenai Tantangan Masyarakat Islam di Eropa: Analisis Resistensi Kelompok Konservatif kanan terhadap Muslim. Penulis juga merupakan alumnus Global Studies Programme di Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

### **R. Siti Zuhro**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiwieqsz@yahoo.com.

**Dhuroruddin Mashad**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan bidang kepakaran politik, politik dan pemerintahan, yang lebih berfokus kepada politik di bidang Agama, Asia Selatan, Dunia Islam, dan Minoritas. Penulis mendapatkan Gelar S1 dan S2 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis baik artikel maupun buku terkait pemilu, agama dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [dhur001@lipi.go.id](mailto:dhur001@lipi.go.id)

**Sutan Sorik**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sutan.sorik98@gmail.com](mailto:sutan.sorik98@gmail.com)

